

ABSTRAK

GENDA TRIANI,2026

Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Demokratis Siswa SMP NEGERI 3 KOTA BENGKULU

Pembimbing: Dr.Elfehmi Lubis, S.Pd.,S.H.,M,Pd

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Demokratis Siswa SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab, yang berkontribusi pada pembentukan karakter demokratis siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru PKn, serta siswa kelas VIII. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi kelas, simulasi pemilu, dan debat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti rendahnya partisipasi siswa, dominasi metode ceramah, serta kurangnya keterlibatan dalam organisasi sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif serta optimalisasi peran organisasi sekolah, seperti OSIS dan ekstrakurikuler, dalam memberikan pengalaman nyata bagi siswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan PKn, metode pembelajaran yang inovatif, serta organisasi sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang demokratis.

Kata Kunci: Nilai Demokrasi, Mata Pelajaran PKn, Pembentukan Karakter

ABSTRAK

GENDA TRIANI, 2026 *The Implementation of Civic Education in Shaping the Democratic Character of Students at SMP Negeri 3 Bengkulu City*

Pembimbing: Dr. Elfahmi Lubis, S.Pd., S.H., M.Pd

The Implementation of Civic Education in Shaping the Character of Students at SMP Negeri 3 Bengkulu City. Civics Education plays a crucial role in instilling democratic values such as freedom of speech, deliberation, justice, and responsibility, which contribute to the formation of students' democratic character,

This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the school principal, Civics Education teachers, and eighth-grade students. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing with verification techniques. The findings indicate that the implementation of democratic values in Civics Education is carried out through various methods, such as class discussions, election simulations, and debates. However, challenges remain, including low student participation, the dominance of lecture-based teaching methods, and limited student involvement in school organizations. To address these issues, more interactive teaching approaches are needed, as well as the optimization of school organizations, such as OSIS and extracurricular activities, to provide students with real experiences of democratic principles. This study confirms that Civics Education, innovative teaching methods, and school organizations play a significant role in fostering students' democratic character.

Keywords: *Values of Democracy, Civics Subject, Character*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 37). Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru tentang konsep pendidikan kewarganegaraan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Suryanto, .2022).

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi Siswa, Widiyanto dan Istiqomah (2023) menjelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran demokrasi siswa sejak dini. PKn berfungsi sebagai sarana edukatif untuk mengenalkan siswa pada nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, toleransi, keadilan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi pilar penting yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Dengan demikian, PKn menjadi media strategis dalam membentuk siswa yang cerdas secara intelektual.

Menghidupkan suasana demokratis di sekolah dapat dimulai dengan melibatkan siswa secara aktif dalam penyusunan “kontrak belajar” di awal semester, di mana mereka tidak hanya menerima aturan dari guru tetapi juga

berhak mengusulkan norma kelas dan konsekuensi yang disepakati bersama. Selain itu, guru dapat menerapkan rotasi kepemimpinan dalam setiap tugas kelompok agar setiap individu belajar memimpin sekaligus mendengarkan, serta menyediakan “kotak aspirasi” sebagai ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan kritik atau ide tanpa rasa takut. Melalui diskusi terbuka mengenai isu-isu relevan dan sesi refleksi rutin di akhir pelajaran, siswa dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat dan memahami bahwa suara mereka memiliki nilai, sehingga sekolah benar-benar menjadi laboratorium sosial yang membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan penuh empati.

Tantangan terbesar dalam membentuk karakter demokratis adalah kecenderungan untuk melihat kepatuhan sebagai satu-satunya bentuk kedisiplinan, sehingga ruang untuk bertanya atau berbeda pendapat sering kali dianggap sebagai tindakan pembangkangan. Masalah ini diperumit ketika pemilihan ketua organisasi atau pengambilan keputusan di kelas hanya menjadi formalitas angka tanpa adanya pendidikan tentang cara menghargai perspektif minoritas, yang akhirnya membuat siswa yang kalah merasa tersisih dan yang menang merasa berkuasa mutlak. Membangun karakter ini membutuhkan lingkungan yang aman bagi siswa untuk berargumen secara sehat, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menghargai proses dialog daripada sekadar hasil akhir, sehingga sekolah benar-benar menjadi laboratorium kecil bagi siswa untuk belajar bahwa demokrasi adalah tentang tanggung jawab, empati, dan keberanian untuk menerima kesepakatan bersama demi kebaikan seluruh warga sekolah.

Membentuk karakter demokrasi di sekolah merupakan upaya sistemik untuk mengubah institusi pendidikan dari sekadar tempat transfer ilmu menjadi

laboratorium sosial yang hidup. Secara luas, karakter demokrasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan ketua OSIS, melainkan manifestasi dari budaya transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Konsep karakter demokrasi di sekolah (Joel Westheimer, 2021) :

Perkembangan moral manusia bergerak dari kepatuhan karena takut hukuman menuju prinsip etis universal. Dalam konteks sekolah, demokrasi membantu siswa naik ke level “kontrak sosial,” di mana mereka menaati aturan bukan karena takut pada guru, melainkan karena memahami bahwa aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Pedagogi Kritis adalah guru dan siswa menjadi rekan pembelajar yang berdialog secara setara.

kecerdasan dan karakter terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam kelas yang demokratis, diskusi antar teman membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kaya karena mereka dipaksa untuk melihat perspektif orang lain yang berbeda dari diri mereka sendiri. Sekolah berperan menanamkan “habitus” atau kebiasaan demokratis. Jika sekolah membiasakan transparansi dan musyawarah, maka nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi menjadi karakter yang dibawa siswa hingga mereka dewasa dan terjun ke masyarakat.

Partisipasi siswa dalam organisasi sekolah, seperti OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler, juga menjadi salah satu indikator bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan di lingkungan pendidikan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, sistem kepemimpinan dalam organisasi sekolah masih bersifat formalitas dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan demokratis yang sesungguhnya, seperti musyawarah, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang adil.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran PKN agar siswa dapat mengalami dan menerapkan demokrasi secara langsung dalam proses belajar. Pendekatan berbasis proyek, diskusi interaktif, dan simulasi kehidupan demokratis perlu lebih sering diterapkan agar siswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan demokrasi yang efektif akan membantu menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Membentuk karakter demokrasi pada siswa bukan sekadar mengajarkan teori di buku, melainkan tentang menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keberanian untuk berpendapat dan kerendahan hati untuk mendengarkan. Menurut Joel Westheimer (2020), sekolah harus berfokus pada pembentukan warga negara yang berorientasi pada keadilan, di mana siswa tidak hanya diajak ikut serta dalam kegiatan formal seperti OSIS, tetapi juga dilatih untuk berdialog secara kritis dan empatik dalam menyelesaikan masalah nyata.

Masalah mendasar di sekolah adalah ketika demokrasi cuma jadi pajangan atau formalitas belaka, seperti pemilihan ketua OSIS yang dirancang mirip pemilu tapi suaranya tidak benar-benar punya kuasa untuk mengubah kebijakan. Banyak guru yang tanpa sadar masih menerapkan budaya “urut kacang” atau kepatuhan buta, di mana siswa yang kritis atau berbeda pendapat sering dicap sebagai anak nakal atau pembangkang, bukannya diapresiasi sebagai bibit pemikir bebas. Akibatnya, diskusi di kelas jadi garing dan searah karena siswa merasa lebih aman untuk diam dan setuju daripada harus berdebat dan mengambil risiko salah. Sistem belajar yang terlalu fokus pada hafal mati teori di buku, sehingga saat ada konflik

nyata di organisasi atau pertemanan, siswa jadi gagap dan tidak tahu cara negosiasi yang adil, yang akhirnya membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang hanya ikut arus mayoritas tanpa punya empati pada suara-suara kecil di sekitarnya.

Pokok permasalahan di atas yang dihadapi dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah adanya jurang pemisah antara teori yang diajarkan di buku dengan praktik nyata di lapangan, di mana pembelajaran sering kali terjebak pada sekadar hafalan materi untuk mengejar nilai akademik tanpa menyentuh aspek perilaku siswa. Masalah ini dapat kita lihat dari lingkungan sekolah yang terkadang masih kurang demokratis serta maraknya pengaruh negatif dari media sosial yang memicu polarisasi, sehingga siswa kesulitan menemukan teladan yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai musyawarah, toleransi, dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pemahaman yang dilakukan guru kepada siswa di kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Bengkulu?
2. Bagaimana bentuk karakter demokratis yang muncul pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Bengkulu?
3. Bagaimana hambatan- hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Proses pemahaman yang dilakukan guru kepada siswa di kelas VIII SMP

Negeri 3 Kota Bengkulu.

2. Bentuk karakter demokratis yang muncul pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Bengkulu.
3. Hambatan- hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Bengkulu?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis :

1. Dapat memperkaya literatur mengenai strategi pengajaran PKn yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di tingkat sekolah menengah pertama.
2. Memberikan dasar pemikiran atau landasan teori baru mengenai hubungan antara kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan pembentukan perilaku demokratis siswa di lingkungan sekolah.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan.

b. Manfaat praktis:

1. Membantu siswa memahami bahwa demokrasi bukan hanya teori di buku, tapi sikap sehari-hari seperti menghargai pendapat teman, berani berpendapat, dan adil.
2. Memberikan inspirasi untuk menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif dan demokratis, sehingga siswa tidak hanya hafal materi tapi juga meresapi nilainya.
3. Membantu sekolah mencetak generasi muda yang memiliki karakter kuat,

cerdas secara kewarganegaraan, dan siap terjun ke masyarakat.

